



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

LAPORAN KINERJA

Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian
Mutu Hasil Perikanan Tahuna

2025



Sppmhkp.tahuna@kkp.go.id
BPPMHKPTAHUNA



KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Tahuna (LKj Stasiun KIPM Tahuna) Tahun Anggaran 2025 disusun sebagai bentuk pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang mewajibkan setiap entitas akuntabilitas kinerja untuk menyusun dan menyajikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan.

Penyusunan Laporan Kinerja Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Tahuna berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan kinerja organisasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, antara lain Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 68 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Seiring dengan penataan kelembagaan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, pelaksanaan tugas dan fungsi Stasiun KIPM Tahuna berada di bawah Badan Pengendalian Mutu dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2021 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2022.

Laporan kinerja ini merupakan wujud pertanggungjawaban kinerja Stasiun KIPM Tahuna kepada para pemangku kepentingan sebagai sarana akuntabilitas publik, yang memuat informasi mengenai capaian kinerja, penggunaan sumber daya, serta tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Badan Pengendalian Mutu dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan. Selain itu, laporan ini juga menyajikan sasaran strategis organisasi beserta indikator kinerja sebagai tolok ukur keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Stasiun KIPM Tahuna.

Landasan penyusunan Laporan Kinerja Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Tahuna Tahun 2025 adalah Rencana Strategis Stasiun KIPM Tahuna yang telah diselaraskan dengan Rencana Strategis Badan Pengendalian Mutu dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan, serta

Perjanjian Kinerja dan Target Kinerja Stasiun KIPM Tahuna Tahun 2025 beserta realisasinya. Secara umum, capaian kinerja Stasiun KIPM Tahuna pada Tahun Anggaran 2025 telah memenuhi target kinerja yang ditetapkan.

Kami berharap Laporan Kinerja ini dapat memberikan manfaat sebagai sarana akuntabilitas dan pertanggungjawaban kinerja organisasi, serta menjadi bahan evaluasi dan masukan dalam rangka peningkatan kinerja Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Tahuna pada masa yang akan datang.

Tahuna, 6 Januari 2026

Plt. Kepala Stasiun KIPM Tahuna,



Aylin Syanet Lalu, S.Si

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR.....	vi
EXECUTIVE SUMMARY.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	9
1.1 PROFIL ORGANISASI 9	
1.2 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI STASIUN KIPM TAHUNA.....	13
1.3 SISTEMATIKA DAN PENYAJIAN	15
BAB II PERENCANAAN KINERJA	16
2.1 VISI DAN MISI 16	
2.2 TUJUAN 16	
2.3 SASARAN, INDIKATOR DAN TARGET KINERJA	17
2.4 PERJANJIAN KINERJA 2025	21
2.5 PENGUKURAN KINERJA.....	21
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	23
3.1 CAPAIAN KINERJA 23	
3.2 ANALISIS DAN EVALUASI.....	25
3.3 REALISASI ANGGARAN 76	
BAB IVP E N U T U P.....	78
4.1 KESIMPULAN 78	
4.2 LANGKAH - LANGKAH UPAYA PERBAIKAN	79
LAMPIRAN	81

DAFTAR TABEL

Tabel 01. 1 Saran Indikator kinerja kegiatan stasiun KIPM Tahuna 2025	8
Tabel 02. Realisasi Capaian strategis dan indikator kinerja Stasiun KIPM Tahuna 2025	11
Tabel 03. Capaian Sasaran Kegiatan Terselenggaranya Pengendalian.....	13
Tabel 04 Capaian Sasaran Kegiatan Terselenggaranya Pengendalian	17
Tabel 06.capaian Sasaran Tatakelolah Pemerintah yang efektif lincah.....	20
Tabel 07. Realisasi IK-9 Tahun 2020-2025 dan Renstra 2020-2025.....	21
Tabel 08. Capaian Sasaran kegiatan pemerinta yang efektif	22
Tabell 09 Realisasi IK-10 Tahun 2020-2025 dan Renstra 2020-2025	24
Tabel 10 Capaian Sasaran Kegiatan tata kelolah pemerintah	25
Tabel 11 Realisasi IK-11 Tahun 2020-2025 dan Renstra 2020-2025.....	26
Tabel 12 Capaian Sasaran kegiatan pemerinta yang efektif	27
Tabel 13. Realisasi IK-14 Tahun 2020-2025 dan Renstra 2020-2025	29

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Stasiun KIPM Tahuna	2
Gambar 2. Peta strategis Stasiun KIPM Tahuna 2025	7
Gambar 3. Status indeks capaian IKK	9
Gambar 4. Dashboard Nilai Pencapaian Sasaran Strategis pada aplikasi Kinerjaku.....	10
Gambar 5 indeks profesionalisme ASN lingkup UPT Stasiun KIPM Tahuna	19
Gambar 6. Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk dierbaikan kinerja lingkup UPT	25

RINGKASAN SINGKAT

Laporan Kinerja Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Tahuna Tahun 2025 merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja Stasiun KIPM Tahuna selama Tahun 2025. Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Tahuna telah menetapkan target kinerja tahun 2025 dalam bentuk Kontrak Kinerja antara Kepala Stasiun KIPM Tahuna dengan Kepala BPPMHKP yang sejalan dengan Sasaran Program Kementerian Kelautan dan Perikanan. Target Kinerja Stasiun KIPM Tahuna terbagi menjadi 2 (dua) karena terjadi perubahan perjanjian kinerja di akhir tahun 2025 atau triwulan IV yaitu yang pertama untuk triwulan I, II dan III terdiri dari 2 Sasaran Program dan 6 Indikator Kinerja, yang kedua untuk triwulan IV tetap masih sama terdiri dari 2 Sasaran Program dan 7 Indikator Kinerja. Perubahan yang terjadi yaitu perubahan target dan uraian indikator kinerja dan Secara garis besar, uraian atas pencapaian Sasaran Program beserta Indikator Kinerja Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan keamanan Hasil Perikanan Tahuna selama tahun 2025 adalah pada tabel 1.1 sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Sasaran Program beserta Indikator Kinerja Stasiun KIPM Tahuna selama tahun 2025

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA		TARGET	REALISASI
Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan	.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Tahuna (%)	70	100
	.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Tahuna (%)	70	50
Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	.	Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup UPT Stasiun KIPM Tahuna (%)	100	100
	.	Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Stasiun KIPM Tahuna (Indeks)	82	83,18
	.	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup UPT Stasiun KIPM Tahuna (Nilai)	86	87,3
	.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup UPT Stasiun KIPM Tahuna	80	100

	(%)		
	Indeks Kepuasan Masyarakat lingkup UPT Stasiun KIPM Tahuna (Nilai)	3,36	3,89

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa sebagian besar target kinerja Stasiun KIPM Tahuna pada tahun 2025 telah berhasil dicapai. Keberhasilan pencapaian tersebut diupayakan untuk semakin ditingkatkan, sedangkan untuk beberapa kegiatan yang belum terlaksana/terdapat permasalahan akan diupayakan untuk dapat diselesaikan. Dengan disusunnya Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait dengan tugas dan fungsi Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan keamanan Hasil Perikanan Tahuna dan menjadi umpan balik peningkatan kinerja Stasiun KIPM Tahuna pada periode berikutnya.

BAB I PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

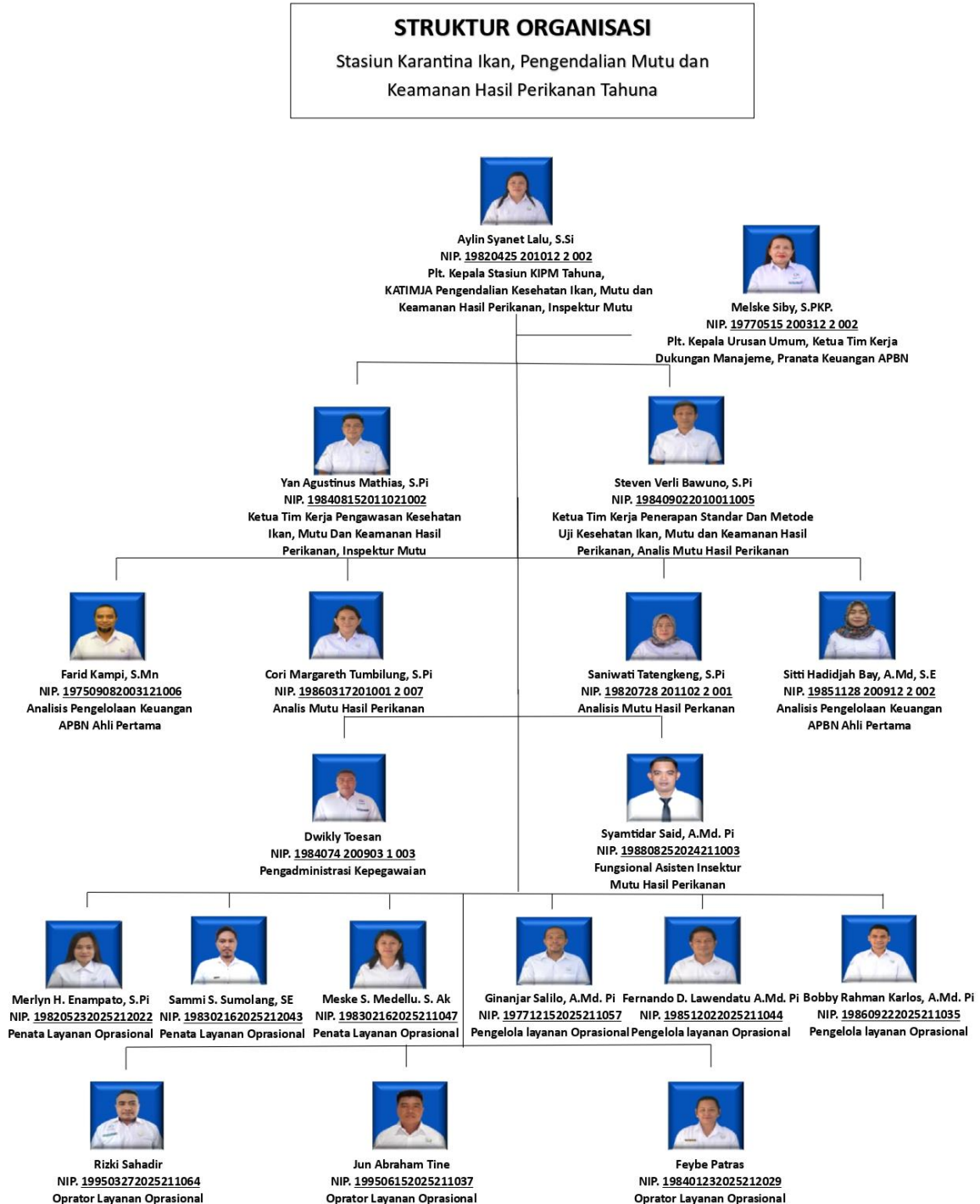
Dalam rangka melaksanakan pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.8/PERMEN-KP/2025 tentang Pengendalian Pelaksanaan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan, dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 16/PERMEN-KP/2025 tentang Kewenangan Pembinaan dan Pengendalian Dalam Rangka Penerbitan Sertifikat Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Stasiun KIPM Tahuna dituntut untuk melaksanakan secara *prudent*, transparan, akuntabel, efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Salah satu asas penyelenggaraan *good governance* adalah asas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan laporan kinerja.

Laporan kinerja disusun sebagai salah satu bentuk pertanggung jawaban BPPMHKP Tahuna dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama triwulan 1 tahun 2025 untuk mencapai visi dan misi Stasiun KIPM Tahuna. Di samping itu, juga sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap satuan kerja di lingkungan Stasiun KIPM Tahuna serta sarana untuk mendapatkan masukan bagi *stakeholders* demi perbaikan kinerja Stasiun KIPM Tahuna. Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, Laporan Kinerja tersebut juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala Stasiun KIPM Tahuna dibantu oleh Kepala Urusan Umum/ Katimja Dukungan Manajerial, Ketua tim kerja Pengawasan Kesehatan Ikan, Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan, ketua tim kerja Pengendalian Kesehatan Ikan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dan Penerapan Standar dan Metode Uji Kesehatan Ikan, Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Pengendalian Informasi, Jabatan Fungsional Umum dan Tertentu, serta seluruh pegawai

STRUKTUR ORGANISASI STASIUN KARANTINA IKAN PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN TAHUNA



Jumlah SDM aparatur yang mendukung Stasiun KIPM Tahuna saat ini berjumlah 19 orang pegawai terdiri dari 9 orang PNS dan 9 orang PPPK dan 1 orang PPPK Paruh Waktu . Distribusi pegawai yang berimbang ini diperlukan dalam membentuk workforce yang efektif dan efisien. Selain itu, Stasiun KIPM Tahuna juga mempertimbangkan komposisi dari segi jabatan, golongan, pendidikan dan kompetensi. Komposisi yang berimbang merupakan dukungan dalam pencapaian sasaran kinerja Stasiun KIPM Tahuna dalam perspektif *learning and growth*.

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI STASIUN KIPM Tahuna

Arah kebijakan dan strategi pembangunan Stasiun KIPM Tahuna disusun dan dilaksanakan dengan mengacu pada arah kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan, serta diselaraskan dengan perkembangan lingkungan yang terjadi. Arah kebijakan pembangunan Stasiun KIPM Tahuna Tahun 2025 adalah mengacu pilar pembangunan kelautan dan perikanan 2021 – 2025, yaitu penegakan kedaulatan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan (*sovereignty*), pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan berkelanjutan (*sustainability*) dan peningkatan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan (*prosperity*).

1. Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan perikanan, melalui strategi:
 - a. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan;
 - b. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan;
2. Tata kelola pemerintah yang baik dilingkungan:
 - a. Survey kepuasan masyarakat;
 - b. Indeks Profesionalitas ASN;
 - c. Penyelesaian temuan BPK;
 - d. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP
 - e. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja:

Isu strategis mutu dan keamanan hasil perikanan mengacu kepada mandat untuk mendukung terwujudnya kedaulatan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan.

SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistematika dan penyajian LKj Tahunan Tahun 2025 merujuk pada aturan dan ketentuan yang berlaku seperti dalam Permenpan RB nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai berikut:

- a. Bab I - Pendahuluan, menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi;
- b. Bab II - Perencanaan Kinerja, menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan;
- c. Bab III - Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja;
- d. Bab IV - Penutup, menjelaskan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya;

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

VISI DAN MISI

Aspek yang berkaitan dengan visi KKP sesuai dengan mandat yang diberikan kepada BPPMHKP adalah dukungan untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat dan mandiri dalam memastikan produk perikanan yang berkualitas dan berwawasan lingkungan. BPPMHKP memberikan mandat kepada Stasiun KIPM Tahuna untuk menetapkan visi pembangunan karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan Tahun 2020-2025, yaitu Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk **“Mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan, Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong”**. Misi yang diemban oleh BPPMHKP untuk mewujudkan visi tersebut sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6 Tahun 2017 adalah:

1. Peningkatan Kualitas Manusia, melalui peningkatan Daya Saing SDM KKP dan Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan.
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing, melalui peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional.
3. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan, melalui Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
4. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya, melalui Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP.

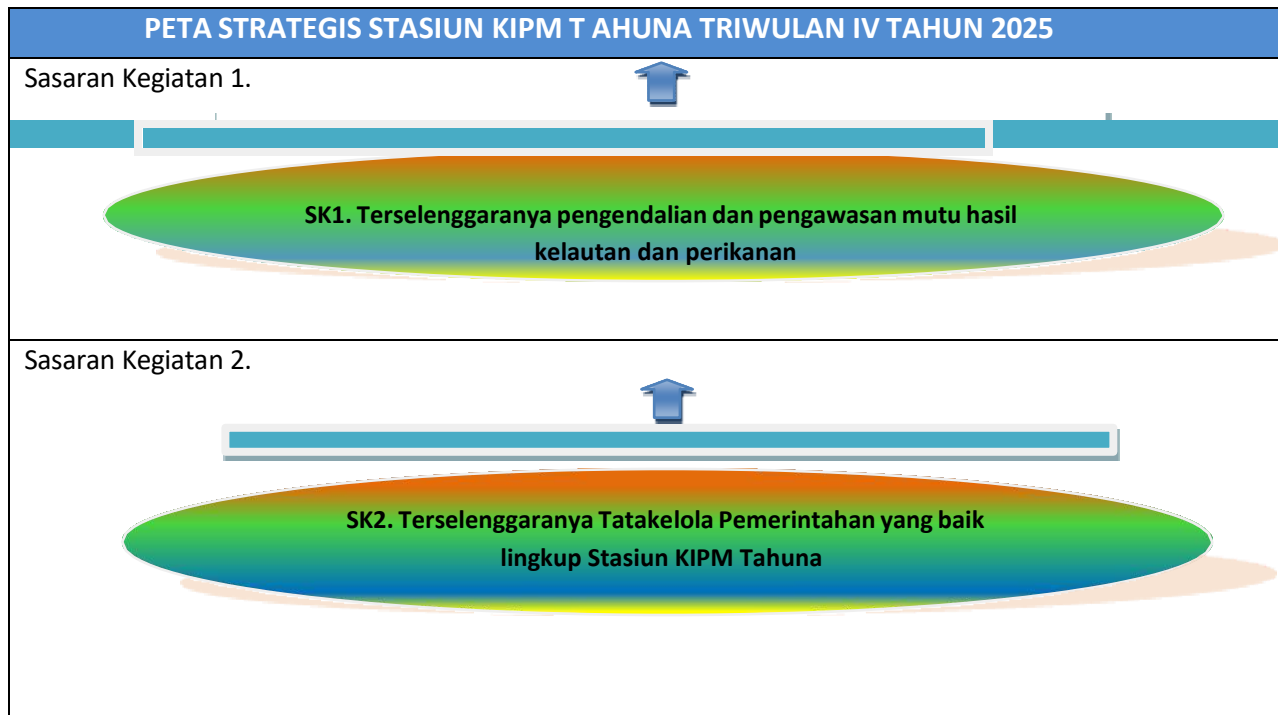
Tujuan pembangunan Stasiun KIPM Tahuna merupakan penjabaran dari visi dan misi guna mendukung prioritas pembangunan kelautan dan perikanan. Tujuan pembangunan yang hendak dicapai dalam rangka mencapai sasaran program prioritas Stasiun KIPM Tahuna adalah Mengendalikan dan Mengawasi Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan

INDIKATOR DAN TARGET KINERJA

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran telah ditetapkan indikator sasaran sebagai ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai rencana tingkat capaian (target) masing-masing. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis. Rencana strategis tersebut dijabarkan ke dalam Peta Strategi Stasiun KIPM Tahuna. Peta Strategi adalah suatu dashboard yang memetakan sasaran strategi organisasi dalam suatu kerangka hubungan sebab akibat yang menggambarkan keseluruhan perjalanan strategi organisasi. Dari Peta Strategi tersebut, dijabarkan indikator dan target kinerja yang akan dicapai Stasiun KIPM Tahuna pada Tahun 2025, sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Stasiun KIPM Tahuna.

Penyusunan Perjanjian Kinerja ditujukan sebagai bentuk transparansi atas akuntabilitas dan kinerja, serta sebagai dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Perjanjian kinerja ini merupakan pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Keputusan Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Nomor 62/KEP- BKIPM/2018 tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.

Peta strategi, sasaran dan indikator kinerja Stasiun KIPM Tahuna Tahun 2025 ditunjukkan pada Gambar 1. dan Tabel 1.1 di bawah ini:



Gambar 1. Peta Strategis STASIUN KIPM Tahuna Tahun 2025

Tabel Sasaran Kegiatan Perjanjian Kinerja Stasiun Tahuna Tahun 2025 diuraikan sebagai berikut :

SASARAN KEGIATAN			INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025
SK.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu Hasi	1.	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Stasiun KIPM Tahuna (%)	70%
		2.	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Stasiun KIPM Tahuna (%)	70%
SK.2	Tata Kelola Pemerintahan yang baik diLingkungan BPPMHK	3.	Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup Stasiun KIPM Tahuna	100%
		4.	Indeks Profesionalitas ASN lingkup Stasiun KIPM Tahuna (Indkes)	82
		5.	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup UPT Stasiun KIPM Tahuna (Nilai)	86
		6.	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Stasiun KIPM Tahuna (%)	80
		7.	Indeks Kepuasan Masyarakat lingkup Stasiun KIPM Tahuna (Indeks)	3,36

Tabel : 2.1 Sasaran Indikator Kinerja Kegiatan Stasiun KIPM Tahuna Tahun 2025

Perjanjian Kinerja Stasiun KIPM Tahuna Tahun 2025 diuraikan seperti pada Tabel berikut ini :

Nilai Pencapaian Sasaran Kegiatan (NPSK) diperoleh melalui serangkaian penghitungan dengan menggunakan data target dan realisasi IKK yang tersedia. Dengan membandingkan antara data target dan realisasi IKK, akan diperoleh indeks capaian IKK. Penghitungan indeks capaian IKK perlu memperhitungkan jenis polarisasi IKK yang berlaku, yaitu *maximize*, *minimize*, dan *stabilize*.

Ketentuan penetapan indeks capaian IKK adalah:

1. Angka maksimum adalah 120;
2. Angka minimum adalah 0;
3. Formula penghitungan indeks capaian IKK untuk setiap jenis polarisasi adalah

berbeda, sebagaimana penjelasan berikut:

a. Polarisasi *Maximize*

Pada polarisasi *maximize*, kriteria nilai terbaik pencapaian IKK adalah realisasi yang lebih tinggi dari target, dengan formula:

$$\text{Indeks Capaian IKK} = \text{Realisasi/Target} \times 100\%$$

b. Polarisasi *Minimize*

Pada polarisasi *minimize*, kriteria nilai terbaik pencapaian IKK adalah realisasi yang lebih kecil dari target, dengan formula:

$$\text{Indeks Capaian IKK} = \{(1 + (1 - \text{Realisasi/Target}))\} \times 100\%$$

c. Polarisasi *Stabilize*

Pada polarisasi *stabilize*, kriteria nilai terbaik pencapaian IKK adalah realisasi yang berada dalam suatu rentang tertentu dibandingkan target.

4. Status indeks capaian IKK adalah sebagai berikut:

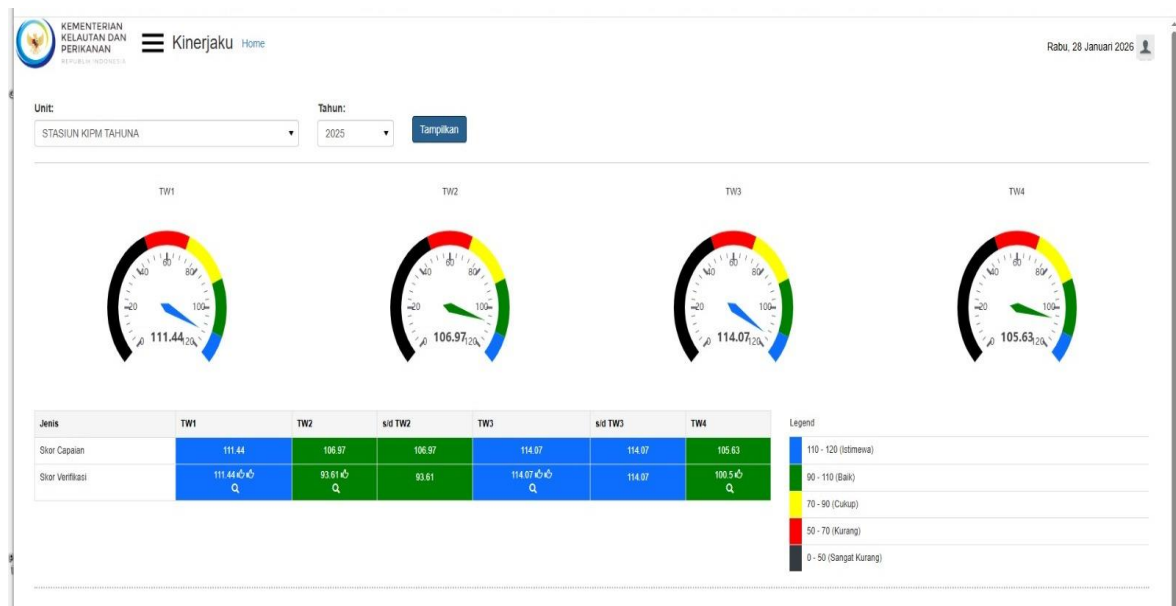


Gambar 3. Status indeks capaian IKK

BAB III AKUNTABILITAS

CAPAIAN KINERJA

Secara umum, target-target kinerja Tahunan pada tahun 2025 sudah tercapai. Berdasarkan *dashboard* sistem aplikasi pengelolaan kinerja di www.kinerjaku.kkp.go.id, nilai pencapaian sasaran kegiatan (NPSK) Stasiun KIPM Tahuna Tahun 2025 sebesar 105,63 %. Nilai NPSK tersebut diperoleh dari pencapaian indikator kinerja pada setiap sasaran kegiatan berdasarkan target yang ditetapkan dalam tahun 2025. Capaian kinerja tersebut merupakan keberhasilan Stasiun KIPM Tahuna dalam melaksanakan program di bidang karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan dalam mendukung visi dan misi BPPMHKP - Kementerian Kelautan dan Perikanan.



Gambar 4. Dashboard Level 2 Capaian IKU Tahunan Tahun 2025 Pada Aplikasi Kinerjaku

Tabel 02. Realisasi Capaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Stasiun KIPM Tahuna Tahun 2025

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET 2025	REALISASI Tahun
SK.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu Hasil Kelautan Perikanan	1	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup stasiun KIPM Tahuna (%)	70	100
		2	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Stasiun KIPM Tahuna (%)	70	50
SK.2	Tata Kelolah pemerintahan yang baik dilingkungan BPPMHKP	3	Indeks Kepuasan Masyarakat lingkup Stasiun KIPM Tahuna (Indeks)	3,36	3,89
		4	Indeks Profesionalitas ASN lingkup Stasiun KIPM Tahuna (Indeks)	82	83,18
		5	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup UPT Stasiun KIPM Tahuna (Nilai)	86	87,3
		6	Penyelesaian temuan BPK lingkup Stasiun KIPM Tahuna (%)	100	100
		7	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Stasiun KIPM Tahuna (%)	80	100

IK1. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Stasiun KIPM Tahuna

a. Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor primer yang memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan adalah ukuran dalam menilai seberapa besar volume atau jumlah produk hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer perikanan budidaya meliputi CBIB,CPIB,CPPIB,CPOIB, CDOIB dan perikanan tangkap meliputi CPIB di kapal yang telah sesuai dengan standar, kriteria keamanan pangan yang ditetapkan oleh Otoritas Kompeten.

b. Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan adalah upaya pencegahan dan pengendalian yang harus diperhatikan dan dilakukan sejak pra produksi sampai dengan pemasaran untuk menghasilkan hasil kelautan dan perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia.Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan dicapai melalui penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.

- c. Sektor produksi perikanan primer merujuk kepada kegiatan yang berfokus pada pengambilan dan pengelolaan sumberdaya hayati perairan yang meliputi penangkapan ikan, budidaya dan pengumpulan hasil laut lainnya.
- d. Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan mengacu kepada: 1. Standar Nasional Indonesia (SNI) 2. Standar lainnya yang dipersyaratkan perdagangan dalam negeri atau luar negeri sesuai ketentuan yang berlaku .
- e. Output kegiatan berupa rekomendasi yang diberikan dari hasil inspeksi dalam sistem OSS maupun secara manual.

Cara Pengukuran :

$$\%X = \frac{A+B+C+D+E}{xn} \times 100\%$$

%X = Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan

A = Persentase Unit Usaha yang menerapkan CBIB

B = Persentase Unit menerapkan CPIB

C = Persentase Unit Usaha yang menerapkan CPPIB

D = Persentase Unit Usaha menerapkan CPOIB

E = Persentase Unit Usaha menerapkan CPIB Kapal

xn = Jumlah dari unsur pembentuk

Capaian Kinerja Selama tahun 2025 untuk IKU Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Tahuna sesuai target yang tertuang dalam perjanjian kinerja tahun 2025 yaitu 70%, dilaksanakan Semester I Stasiun KIPM Tahuna hanya melakukan sertifikasi terhadap 1 jenis sertifikasi yaitu Sertifikat Cara Penanganan Ikan Yang Baik (CPIB) Di Kapal Perikanan, Sertifikat Cara Penanganan Ikan Yang Baik (CPIB) di atas kapal adalah sertifikat yang diberikan kepada kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan yang menyatakan bahwa kapal tersebut telah memenuhi persyaratan Pengendalian Mutu pada kegiatan Penangkapan Ikan. Inspeksi dilakukan di Kapal Perikanan KM. Grasia 3 pada tanggal 12 Juni 2025 masa berlaku 2 Tahun Sebanyak 1 sertifikat telah terbit pada bulan Juni 2025, total capaian 100% dari target 70%.

$$\%X = \frac{0 + 0 + 0 + 0 + 100}{1} \times 100\%$$

$$\%X = 100\%$$

Pada Semester II tahun 2025 Stasiun KIPM Tahuna hanya melakukan sertifikasi terhadap 2 jenis sertifikasi yaitu :

- a. Sertifikat CPIB Pada Pembenihan;
 - b. Sertifikat CPIB Kapal Perikanan.
1. Sertifikat CPIB Pada Pembenihan adalah pedoman dan tata mengembangbiakkan ikan dengan cara melakukan manajemen induk, pemijahan, penetasan telur dan pemeliharaan larva/benih dalam lingkungan yang terkontrol sehingga memberikan jaminan mutu dan keamanan pangan dari pembudidayaan dengan memperhatikan sanitasi, pakan, dan obat ikan. Kegiatan CPIB dilaksanakan pada 1 unit pembenihan milik Bapak Indra Hiwoi di Kampung Taloarane Kec. Manganitu. Inspeksi CPIB ini dilaksanakan oleh inspektur Mutu Stasiun KIPM Tahuna bersama Staf dari Dinas Perikanan Daerah Kab.Kepl. Sangihe, dan penyuluh perikanan KKP di Kab.Kepl.Sangihe. Adapun ruang lingkup yang diinspeksi adalah 1 Ruang Lingkup (Kode KBLI 03226) dengan komoditas Benih Ikan Nila
 2. Sertifikat CPIB Kapal Perikanan adalah sertifikat yang diberikan kepada kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan yang menyatakan bahwa kapal tersebut telah memenuhi persyaratan Pengendalian Mutu pada kegiatan Penangkapan Ikan. Inspeksi dilakukan di 7 unit kapal perikanan. Output dari kegiatan ini terdiri dari, (Tujuh) Sertifikat CPIB Kapal Perikanan dengan masa berlaku 2 (Dua) tahun yang terbit di bulan Juli 2 Kapal (KM Marcopolo Star dan KM Madina Tahuna), bulan Agustus 1 Kapal (KMN Borneo Utara), bulan September 2 Kapal Perikanan (KM Muslimah dan KM Mina Maritim 160), dan bulan Oktober 2 Kapal Perikanan (KM Christnel dan KM Grasia 2)

$$\%X = \frac{\text{CPIB Pembenihan } 1 (100\%) + \text{CPIB Kapal } 7 (100\%)}{2} \times 100\%$$

$$\%X = 100\%$$

Untuk target dan capaian realisasi tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 3.2 berikut :
Tabel 3. 2 Capaian Sasaran Kegiatan Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan IK 1

Indikator Kinerja	Target	Capaian	% Terhadap Target 2025
Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Tahuna (%)	70	100	120

Tingkat efektivitas kinerja diukur melalui perbandingan antara realisasi capaian dan target IKU, dengan hasil sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas Kinerja} = \frac{100\%}{70\%} \times 100\% = 142,86\%$$

Pelaksanaan IKU Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan pada UPT Stasiun KIPM Tahuna Tahun 2025 menunjukkan kinerja sangat berhasil, dengan capaian 100%, melampaui target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja sebesar 70%.

Keberhasilan ini ditandai dengan:

1. Terlaksananya seluruh kegiatan sertifikasi baik pada Semester I maupun Semester II sesuai rencana.
2. Peningkatan cakupan sertifikasi dari hanya 1 jenis sertifikasi pada Semester I menjadi 2 jenis sertifikasi pada Semester II
3. Kepatuhan pelaku usaha sektor produksi primer terhadap standar mutu dan keamanan pangan yang semakin meningkat.
4. Seluruh sertifikat diterbitkan tepat waktu sesuai jadwal inspeksi dan proses evaluasi.

Tidak terdapat kegagalan kinerja pada IKU ini. Sebaliknya, terjadi peningkatan kinerja yang signifikan, baik dari sisi:

- jumlah unit yang disertifikasi,
- variasi jenis sertifikasi,
- serta luas wilayah layanan (lintas kabupaten/kota).

Beberapa faktor utama yang mendukung keberhasilan pencapaian IKU ini antara lain:

1. Sinergi lintas sektor antara Stasiun KIPM Tahuna dengan Dinas Perikanan Kabupaten/Kota serta penyuluh perikanan.
2. Kesiapan pelaku usaha dalam memenuhi persyaratan teknis sertifikasi.
3. Kompetensi dan komitmen inspektur dalam melaksanakan inspeksi lapangan secara profesional dan objektif.
4. Perencanaan kegiatan yang efektif, sehingga seluruh target dapat diselesaikan dalam tahun

berjalan.

Dalam rangka mengantisipasi potensi kendala lapangan, Stasiun KIPM Tahuna telah melakukan beberapa alternatif solusi, antara lain:

1. Penjadwalan inspeksi secara fleksibel menyesuaikan kondisi lapangan dan kesiapan pelaku usaha.
2. Pendampingan teknis pra-sertifikasi, khususnya bagi pelaku usaha yang baru pertama kali mengajukan sertifikasi.
3. Koordinasi intensif dengan pemerintah daerah untuk mempercepat pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis.
4. Optimalisasi sumber daya internal, terutama dalam penugasan inspektur. Sebagai upaya menjaga dan meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya, Stasiun KIPM Tahuna merekomendasikan:

1. Peningkatan target IKU secara bertahap, sejalan dengan kapasitas layanan dan potensi wilayah.
 2. Penguatan pendampingan kepada pelaku usaha, khususnya usaha skala kecil dan menengah.
 3. Peningkatan sosialisasi standar mutu dan keamanan pangan di sentra produksi primer.
 4. Pengembangan sistem monitoring pasca-sertifikasi untuk menjaga keberlanjutan kepatuhan.
 5. Optimalisasi dukungan anggaran dan SDM, guna memperluas cakupan sertifikasi dan meningkatkan kualitas layanan.
-
2. Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Tahuna

Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Pasca Panen yang memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan adalah ukuran dalam menilai seberapa besar volume atau jumlah produk hasil kelautan dan perikanan sektor Produksi Pasca Panen meliputi: PMMT/HACCP dan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) yang telah sesuai dengan standar, kriteria keamanan pangan yang ditetapkan oleh Otoritas Kompeten.

Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan adalah upaya pencegahan dan pengendalian yang harus diperhatikan dan dilakukan sejak pra produksi sampai dengan pemasaran untuk menghasilkan hasil kelautan dan perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia. Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan dicapai melalui penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.

Sektor produksi Pasca Panen merujuk kepada rangkaian kegiatan yang dilakukan setelah ikan atau hasil perikanan ditangkap dengan tujuan untuk meningkatkan nilai, menjaga kualitas, memperpanjang umur simpan produk perikanan yang meliputi Penanganan, Pengolahan, Distribusi, hingga pemasaran produk perikanan.

Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan mengacu kepada: a. Standar Nasional Indonesia (SNI); b. Standar Internasional (Codex Alimentarius); c. Standar lainnya yang dipersyaratkan perdagangan dalam negeri atau luar negeri sesuai ketentuan yang berlaku.

Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP dan SKP yang diterbitkan berdasarkan ruang lingkup produk, jenis olahan ikan, unit proses, dan/atau potensi bahaya (hazard) yang berbeda yang ditangani dan/atau diolah.

Cara Pengukuran

$$\%X = \frac{A+B}{xn} X 100\%$$

%X = Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan

A = Presentase Penerbitan Sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk

B = Persentase SKP yang diterbitkan di Unit Pengolahan Ikan skala UMKM dan menengah besar yang menerapkan GMPSSOP

xn = Jumlah dari unsur pembentuk (2)

Selama tahun 2025 Pada Triwulan I, Triwulan III, dan Triwulan IV Stasiun KIPM Tahuna belum ada permohonan sertifikasi baik untuk Sertifikasi HACCP maupun Sertifikasi SKP.

Pada Triwulan II tahun 2025 Stasiun KIPM Tahuna hanya melakukan sertifikasi Kelayakan Pengolahan (SKP). Pelaksanaan sertifikasi SKP berdasarkan Surat Rekomendasi yang diterbitkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Utara, untuk Unit Pengolahan Ikan (UPI) yang ada di wilayah kerja Stasiun KIPM Tahuna yaitu Kab. Kepl. Sangihe, Sitaro, dan Talaud. Proses Sertifikasi Kelayakan Pengolahan (SKP) dilakukan oleh Inspektur Mutu dan Asisten Inspektur mutu serta analisis mutu hasil perikanan yang ada di Stasiun KIPM Tahuna. Kegiatan Sertifikasi ini dilaksanakan terhadap 1 Unit Pengolahan Ikan yang telah mengajukan Permohonan Sertifikasi Kelayakan Pengolahan (SKP) berdasarkan Rekomendasi dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Utara yaitu PT. Jassendo Sentosa Mandiri, Dagho jenis produk ikan pelagis segar, ikan pelagis beku, ikan tuna segar, ikan tuna beku, ikan demersal segar, dan ikan demersal beku, tanggal berlaku sertifikat 14 Mei 2025 sd 14 Mei 2027. Untuk sertifikasi HACCP belum ada permohonan yang masuk dari pelaku usaha. Hal ini menyebabkan tidak terpenuhinya target Sertifikasi HACCP yang ditetapkan pusat yaitu 2 sertifikat.

A (Persentase Penerbitan Sertifikat HACCP) = 0 %

B (Persentase Penerbitan Sertifikat SKP) = 100 %

$$\% X = \frac{A + B}{Xn} X 100 \%$$

$$\% X = \frac{100}{2} X 100 \%$$

% X = 50 %

Secara keseluruhan, capaian kinerja IKU ini tidak sepenuhnya gagal. Capaian IKU yang tidak terpenuhi yaitu HACCP (target 2 Sertifikat, capaian 0), karna belum adanya pengajuan Sertifikasi HACCP dari UPI. Kondisi ini disebabkan karna UPI di wilayah kerja UPT Stasiun KIPM Tahuna yang meliputi Kab.Kepl.Sangihe, Sitaro dan Talaud masih berfokus pada pengiriman ikan untuk pasar Domestik sehingga tingkat kesadaran terhadap pentingnya Sertifikasi jaminan Mutu dan Keamanan Pangan masih relatif rendah. Selain masa kontrak UPI yang beroperasi di sentra Kelautan dan Perikanan terpadu (SKPT Dagho) akan berakhir pada Tahun 2026, sehingga UPI cenderung enggan melakukan perpanjangan

Dalam rangka mengatasi kendala dan meningkatkan capaian kinerja, Stasiun KIPM Tahuna telah melakukan beberapa alternatif solusi, antara lain:

1. Pendampingan teknis intensif kepada UPI dalam pemenuhan persyaratan HACCP dan SKP.
2. Koordinasi aktif dengan pelaku usaha untuk penjadwalan inspeksi yang lebih efektif.
3. Penyederhanaan alur pelayanan internal tanpa mengurangi kualitas dan akuntabilitas proses sertifikasi.
4. Optimalisasi peran inspektur melalui pengaturan penugasan yang efisien dan terencana.

Untuk menjaga keberlanjutan dan peningkatan kinerja pada tahun berikutnya, Stasiun KIPM Tahuna melakukan dan merekomendasikan upaya sebagai berikut:

1. Meningkatkan intensitas sosialisasi HACCP dan SKP kepada UPI, khususnya UPI skala kecil dan menengah.
2. Memperkuat pendampingan pra-sertifikasi agar kesiapan pelaku usaha lebih merata sejak awal tahun.
3. Meningkatkan target IKU secara bertahap, sejalan dengan tren peningkatan kinerja dan potensi wilayah.
4. Mengembangkan sistem monitoring pasca-sertifikasi untuk menjaga konsistensi penerapan standar mutu dan keamanan pangan.
5. Mempertahankan efisiensi penggunaan anggaran dengan tetap mengutamakan kualitas layanan sertifikasi.

Untuk target dan capaian realisasi tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 3.4 berikut:

Tabel 3. 4 Capaian Sasaran Kegiatan Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan IK 2

Indikator Kinerja	Target	Capaian	% Terhadap Target 2025
Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Tahuna (%)	70	50	71,43

Dalam kegiatan Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Tahuna tidak terdapat kendala sehingga kegiatannya tetap dilaksanakan sebagaimana mestinya demikian dengan terlaksananya kegiatan.

Pelaksanaan IKU Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan pada UPT Stasiun KIPM Tahuna Tahun 2025 dengan capaian 50%, tidak mencapai target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja sebesar 70%.

3. Indeks Kepuasan Masyarakat lingkup UPT Stasiun KIPM Tahuna
 - a. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik.
 - b. Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup BPPMHKP menggunakan elektronik SKM (e-survey SKM), masyarakat/pengguna jasa untuk dapat menyatakan persepsi atas kepuasan layanan dapat mengakses Aplikasi Survey Kepuasan Masyarakat dengan alamat: <https://ptsp.kkp.go.id/skm/login> Aplikasi yang terdapat di web tersebut dapat di akses oleh kepada pengguna jasa di masing masing UPT BPPMHKP.
 - c. Daftar pertanyaan survey terdiri atas 9 unsur pertanyaan berupa Persyaratan; Sistem; Prosedur; Waktu Pelayanan; Biaya/Tarif; Produk Spesifikasi; Kompetensi Pelaksana; Perilaku Pelaksana; Penanganan Pengaduan; dan Sarana. Nilai indeks diperoleh dari nilai total rata-rata hasil kuisioner dari seluruh UPT BPPMHKP.

Pengukuran:

$$\text{Bobot Nilai rata-rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{9} = 0.1111$$

Untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan, digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{IKM} = \frac{\text{Total dari nilai persepsi per unsur} \times \text{Nilai penimbang}}{\text{Total unsur yang terisi}}$$

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25-100 maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut: $\text{IKM unit pelayanan} \times 25$

Pada Triwulan I tahun 2025 Stasiun KIPM Tahuna Nilai SKM adalah 86,69 atau 98,51% dari Target 88 sehingga belum tercapai.

1. Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Stasiun KIPM Tahuna

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas tugasnya.

Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN

berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan.

Formula Perhitungan:

$$IP = \sum_{i=1}^4 IP_i$$

$$= IP_1 + IP_2 + IP_3 + IP_4$$

Keterangan:

IP = Indeks Profesionalisme

IP_i = Indeks Profesionalisme ke-i

IP_1 = Indeks Profesionalisme Dimensi Kualifikasi

IP_2 = Indeks Profesionalisme Dimensi Kompetensi

IP_3 = Indeks Profesionalisme Dimensi Kinerja

IP_4 = Indeks Profesionalisme Dimensi Disiplin

$$IP_1 = W_{1j} * R_{1j}$$

$$IP_1 = W_{2k} * R_{2k}$$

$$IP_1 = W_{3l} * R_{3l}$$

$$IP_1 = W_{4m} * R_{4m}$$

$W_{1j} * R_{1j}$ = Bobot Indikator Kualifikasi ke-j * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-j

$W_{2k} * R_{2k}$ = Bobot indikator Kualifikasi ke-k * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-k

$W_{3l} * R_{3l}$ = Bobot indikator Kualifikasi ke-l * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-l

$W_{4m} * R_{4m}$ = Bobot indikator Kualifikasi ke-m * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-m

Pada Semester I tahun 2025 Stasiun KIPM Tahuna Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Stasiun KIPM Tahuna adalah 83,18 dari target 82 atau 101,43%. Dapat dilihat pada gambar 3.6 berikut:

IP ASN 2025

Dashboard

Eselon

Pegawai

FAQ

IP ASN 2024

Silakan ketik Nama Unit Kerja

Cari

No	Unit Kerja	Jumlah Pegawai Yang Dihitung	Kualifikasi (bobot 25)		Kompetensi (bobot 40)		Kinerja (bobot 30)		Disiplin (bobot 5)		TOTAL	Keterangan
			IP	Presentase	IP	Presentase	IP	Presentase	IP	Presentase		
46	STASIUN KIPM BIMA	5	24	96 %	35	87,5 %	25	83,33 %	5	100 %	89	TINGGI
47	STASIUN KIPM TAHUNA	11	22,73	90,92 %	30,45	76,13 %	25	83,33 %	5	100 %	83,18	TINGGI
48	STASIUN KIPM BALI-BALI	11	21,82	87,28 %	33,09	82,73 %	25	83,33 %	5	100 %	84,91	TINGGI
49	STASIUN KIPM MERAK	11	22,73	90,92 %	31,07	77,68 %	25	83,33 %	5	100 %	83,8	TINGGI
50	STASIUN KIPM MAMRUI	11	22,73	90,92 %	32,73	81,82 %	25	83,33 %	5	100 %	85,45	TINGGI
51	BALAI LISI STANDAR KIPM	20	22,5	90 %	34,39	85,97 %	25	83,33 %	4,8	96 %	86,69	TINGGI

<

1

2

3

>

Gambar 3. 6 Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Stasiun KIPM Tahuna

Pada Semester II tahun 2025 Stasiun KIPM Tahuna Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Stasiun KIPM Tahuna adalah 83,9 dari target 83 atau 102,32 % Dapat dilihat pada gambar 3.7 berikut:

IP ASN 2025 Dashboard Eselon Pegawai FAQ IP ASN 2024												
Silakan ketik Nama Unit Kerj			Cari									
No	Unit Kerja	Jumlah Pegawai Yang Dihitung	Kualifikasi (bobot 25)		Kompetensi (bobot 40)		Kinerja (bobot 30)		Disiplin (bobot 5)		TOTAL	Keterangan
			IP	Presentase	IP	Presentase	IP	Presentase	IP	Presentase		
46	STASIUN KIPM BIMA	5	24	96 %	35	87.5 %	25	83.33 %	5	100 %	89	TINGGI
47	STASIUN KIPM TAHUNA	11	22.73	90.92 %	30.45	76.13 %	25	83.33 %	5	100 %	83.18	TINGGI
48	STASIUN KIPM BALI-BALI	11	21.82	87.28 %	33.09	82.73 %	25	83.33 %	5	100 %	84.91	TINGGI
49	STASIUN KIPM MERAK	11	22.73	90.92 %	31.07	77.68 %	25	83.33 %	5	100 %	83.8	TINGGI
50	STASIUN KIPM MAMUJU	11	22.73	90.92 %	32.73	81.82 %	25	83.33 %	5	100 %	85.45	TINGGI
51	BALAI US STANDAR KIPM	20	22.5	90 %	34.39	85.97 %	25	83.33 %	4.8	96 %	86.69	TINGGI

Untuk target dan capaian realisasi tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 3.18 berikut:

Tabel 3. 18 Capaian Sasaran Kegiatan Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan IK 9

Indikator Kinerja	Target	Capaian	% Terhadap Target 2025
Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Stasiun KIPM Tahuna (Indeks)	82	83,18	101,43 %

Pada Semester I Tahun 2025, Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Stasiun KIPM Tahuna mencapai 64,67 dari target 87 atau sebesar 75,19%, yang menunjukkan kinerja perlu peningkatan di triwulan selanjutnya. Capaian ini mencerminkan peningkatan kompetensi, kinerja, dan integritas ASN dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

Selanjutnya, pada Semester II Tahun 2025, nilai Indeks Profesionalitas ASN meningkat menjadi 83 dari target 87 atau sebesar 95,40%. persentase capaian terhadap target relatif meningkat dibandingkan Semester I, hal tersebut disebabkan oleh peningkatan target kinerja pada Semester II. Secara absolut, nilai indeks menunjukkan peningkatan kinerja ASN, yang menandakan adanya perbaikan berkelanjutan dalam aspek profesionalitas ASN.

Dengan demikian, tidak terdapat kegagalan kinerja pada IKU ini, dan secara keseluruhan kinerja Indeks Profesionalitas ASN berada pada kategori baik.

Untuk mencapai dan mempertahankan capaian Indeks Profesionalitas ASN, Stasiun KIPM Tahuna telah melaksanakan berbagai langkah dan alternatif solusi, antara lain:

1. Peningkatan kompetensi ASN melalui keikutsertaan dalam pendidikan dan pelatihan teknis, fungsional, dan manajerial.
2. Optimalisasi pengelolaan kinerja ASN, termasuk pengisian dan pemantauan kinerja melalui sistem manajemen kinerja ASN.
3. Pembinaan dan pengawasan disiplin ASN secara berkelanjutan oleh pimpinan unit kerja.
4. Penataan administrasi kepegawaian, termasuk pemutakhiran data ASN sebagai dasar pengukuran Indeks Profesionalitas ASN.

Efisiensi penggunaan sumber daya dalam peningkatan Indeks Profesionalitas ASN tercermin dari:

1. Pemanfaatan sumber daya internal secara optimal, khususnya pejabat pengelola kepegawaian dan atasan langsung ASN.
2. Pelaksanaan pengembangan kompetensi secara selektif dan prioritas, disesuaikan dengan kebutuhan jabatan.
3. Pemanfaatan metode pembelajaran daring dan internal sharing knowledge, sehingga mengurangi kebutuhan biaya pelatihan.
4. Integrasi kegiatan pembinaan ASN dengan kegiatan rutin organisasi, sehingga tidak memerlukan tambahan anggaran yang signifikan.

Dalam rangka menjaga dan meningkatkan capaian Indeks Profesionalitas ASN ke depan, Stasiun KIPM Tahuna melakukan dan merekomendasikan upaya sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas dan relevansi pengembangan kompetensi ASN, sesuai dengan kebutuhan organisasi dan jabatan.
2. Mendorong peningkatan kualifikasi dan kompetensi ASN secara berkelanjutan, termasuk melalui pendidikan lanjutan dan sertifikasi.
3. Memperkuat budaya kerja profesional, berintegritas, dan berorientasi pada kinerja.
4. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap komponen Indeks Profesionalitas ASN, guna memastikan perbaikan yang berkelanjutan.
5. Menyesuaikan target Indeks Profesionalitas ASN secara bertahap, agar tetap realistis namun menantang.

Kegiatan Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Stasiun KIPM Tahuna tidak terdapat kendala sehingga dalam prosesnya kegiatan berjalan lancar.

Untuk perbandingan target dan realisasi IKU serta renstra 2019-2024 ditampilkan pada tabel 3.19 berikut ini:

Tabel 3. 19 Realisasi IK-9 Tahun 2020-2025 dan Renstra 2020-2025

Indikator Kinerja	Realisasi					2025		Renstra 2020-2025	
	2020	2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Stasiun KIPM Tahuna (Indeks)	-	-	-	-	88	82	83,18	70	70

2.Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup UPT Stasiun KIPM Tahuna

Indikator yang mengukur implementasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah melalui penilaian mandiri dengan aspek penilaian antara lain perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja.

Nilai PM SAKIP Unit Eselon I dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat

4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), dan evaluasi kinerja (25%). Nilai PM SAKIP Unit Eselon I merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP di Unit Eselon I di lingkungan KKP. Penilaian mandiri SAKIP dilaksanakan oleh Inspektorat Mitra Unit Organisasi Eselon I, dan data capaian rillis melalui surat dari Inspektorat Jenderal.

Kategori nilai PM SAKIP Unit Eselon I yaitu:

Kategori	Nilai	Predikat
AA	>90 – 100	Sangat Memuaskan
A	>80 – 90	Memuaskan
BB	>70 – 80	Sangat Baik
B	>60 – 70	Baik
CC	>50-60	Cukup
C	>30 – 50	Kurang
D	0 – 30	Sangat Kurang

Pada tahun 2025 Stasiun KIPM Tahuna Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup UPT Stasiun KIPM Tahuna sebesar 87,3 (A Memuaskan) atau 100,99% dari 86. Dapat dilihat pada gambar 3.8 berikut:

19	SKIPM PEKANBARU	27	27	13.5	20.5	88	A
20	SKIPM PALU	27	27	11.4	22.5	87.9	A
21	BKIPM SURABAYA II	27	27	12.6	21.25	87.85	A
22	SKIPM MEDAN II	27	26.4	11.85	22.5	87.75	A
23	SKIPM PADANG	27	25.5	12.6	22.5	87.6	A
24	BKIPM ENTIKONG	27	25.5	13.8	21.25	87.55	A
25	BKIPM BALIKPAPAN	27	27	13.5	20	87.5	A
26	SKIPM GORONTALO	27.6	24.6	12.6	22.5	87.3	A
27	SKIPM TAHUNA	26.1	27	11.7	22.5	87.3	A
28	BKIPM AMBON	27	25.5	13.5	21.25	87.25	A
29	SKIPM SORONG	25.5	26.1	13.05	22.5	87.15	A
30	SKIPM KUPANG	27	27	11.85	21.25	87.1	A
31	SKIPM PANGKAL DINJANG	27	27	11.85	21.25	87.1	A

Gambar 3. 8 Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup UPT Stasiun KIPM Tahuna

Untuk target dan capaian realisasi tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 3.20 berikut:

Tabel 3. 20 Capaian Sasaran Kegiatan Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan IK 10

Indikator Kinerja	Target	Capaian	% Terhadap Target 2025
Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup UPT Stasiun KIPM Tahuna (Nilai)	86	87,3	100

Pada Tahun 2025, Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup UPT Stasiun KIPM Tahuna mencapai 86 dengan predikat A (Memuaskan) atau 100% dari target yang ditetapkan. Capaian ini menunjukkan bahwa penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) telah berjalan sangat baik dan memenuhi standar akuntabilitas kinerja yang ditetapkan.

Keberhasilan ini mencerminkan meningkatnya kualitas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, serta evaluasi internal yang terintegrasi dan konsisten. Tidak terdapat kegagalan dalam pencapaian indikator ini, dan capaian kinerja menunjukkan kondisi stabil dan terjaga pada kategori memuaskan. Peningkatan kualitas SAKIP juga dipengaruhi oleh konsistensi pelaksanaan tindak lanjut hasil evaluasi tahun sebelumnya.

Untuk mencapai nilai Penilaian Mandiri SAKIP yang memuaskan, Stasiun KIPM Tahuna telah melakukan berbagai langkah dan alternatif solusi, antara lain:

1. Penyempurnaan dokumen perencanaan kinerja, termasuk penyelarasan Renstra, Perjanjian Kinerja, dan Rencana Aksi Kinerja.
2. Penguatan pengukuran dan pemantauan kinerja, melalui monitoring capaian indikator kinerja secara berkala.
3. Peningkatan kualitas pelaporan kinerja, dengan menekankan keterkaitan antara perencanaan, pelaksanaan, dan hasil kinerja.
4. Pelaksanaan evaluasi internal SAKIP, sebagai sarana identifikasi kelemahan dan perbaikan berkelanjutan.
5. Pendampingan dan koordinasi internal lintas fungsi, untuk memastikan keseragaman pemahaman SAKIP. Efisiensi penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan SAKIP tercermin dari:

1. Optimalisasi peran tim internal SAKIP, tanpa pembentukan struktur tambahan yang memerlukan biaya besar.
2. Pemanfaatan sistem informasi kinerja yang tersedia, sehingga proses pengumpulan dan pengolahan data menjadi lebih cepat dan efisien.
3. Integrasi kegiatan SAKIP dengan kegiatan manajemen rutin, sehingga tidak menimbulkan beban anggaran tambahan.
4. Pemanfaatan forum koordinasi internal, sebagai sarana peningkatan kapasitas tanpa biaya tambahan yang signifikan.

Dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan kualitas penerapan SAKIP ke depan, Stasiun KIPM Tahuna melakukan dan merekomendasikan upaya sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas indikator kinerja agar lebih berorientasi pada outcome dan dampak.
2. Memperkuat keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, dan kinerja, agar lebih efektif dan terukur.
3. Meningkatkan kapasitas SDM pengelola SAKIP, melalui pembinaan dan pembelajaran berkelanjutan.
4. Memperkuat pengendalian internal dan evaluasi kinerja, guna menjaga konsistensi penerapan SAKIP.
5. Menindaklanjuti hasil evaluasi SAKIP secara berkelanjutan, sebagai dasar peningkatan nilai SAKIP di tahun berikutnya.

Kegiatan Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup UPT Stasiun KIPM Tahuna tidak terdapat kendala sehingga dalam prosesnya kegiatan berjalan lancar. Untuk perbandingan target dan realisasi IKU serta renstra 2019-2024 ditampilkan pada tabel 3.21 berikut ini:

Tabel 3. 21 Realisasi IK-10 Tahun 2020-2025 dan Renstra 2020-2025

Indikator Kinerja	Realisasi					2025		Renstra 2020-2025	
	2020	2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup UPT Stasiun KIPM Tahuna (Nilai)	-	-	-	-	62,80	86	87,3	70	70

3. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup UPT Stasiun KIPM Tahuna

- 1) Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik bentuk surat maupun Bab) yang terbit pada Triwulan II tahun 2023 s.d Triwulan IV Tahun 2025 yang telah ditindaklanjuti (berstatus proses dan/atau tuntas) yang menjadi objek pengawasan.
- 2) Nilai Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup UPT Lingkup BPPMHKP menggunakan nilai Eselon I BPPMHKP.

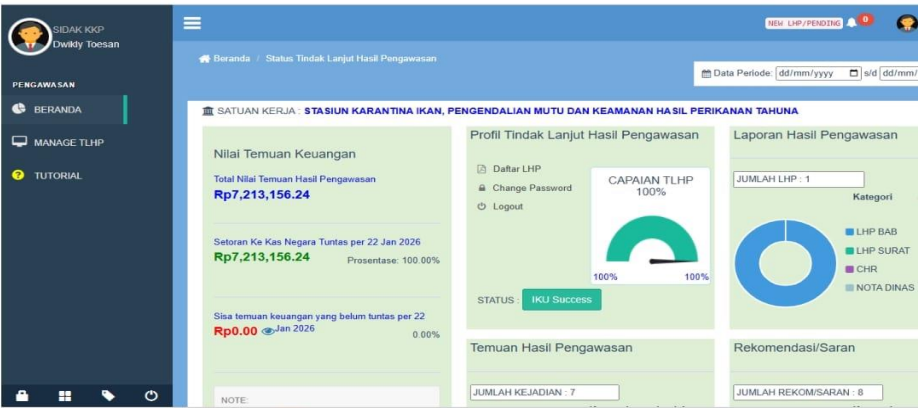
Pengukuran:

$$\frac{\sum N_t}{\sum N} \times 100$$

$\sum N_t$: Jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal KKP yang telah ditindaklanjuti
 $\sum N$: Jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal KKP yang diberikan

Pada tahun 2025 Stasiun KIPM Tahuna Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup UPT Stasiun KIPM Tahuna dilaksanakan mulai

dari triwulan I s.d triwulan IV dan telah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindak lanjut adalah TUNTAS) 100%. Dapat dilihat pada gambar 3.9 berikut:



Gambar 3. 9 Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup UPT Stasiun KIPM Tahuna

Untuk target dan capaian realisasi tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 3.22 berikut:

Tabel 3. 22 Capaian Sasaran Kegiatan Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan IK 11

Indikator Kinerja	Target	Capaian	% Terhadap Target 2025
Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup UPT Stasiun KIPM Tahuna (%)	80	100	125 %

Pada Tahun 2025, Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup UPT Stasiun KIPM Tahuna dilaksanakan secara berkelanjutan sejak Triwulan I sampai dengan Triwulan IV dan seluruh rekomendasi hasil pengawasan telah ditindaklanjuti secara tuntas (status TUNTAS). Dengan demikian, capaian indikator ini mencapai 100%, sesuai dengan target yang ditetapkan.

Keberhasilan pencapaian indikator ini menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan internal telah berjalan efektif dan rekomendasi yang diberikan mampu dimanfaatkan secara optimal sebagai dasar perbaikan kinerja organisasi. Tidak terdapat kegagalan maupun penurunan kinerja pada indikator ini, karena seluruh temuan dan rekomendasi dapat diselesaikan tepat waktu serta ditindaklanjuti sesuai ketentuan. Capaian 100% juga mencerminkan meningkatnya komitmen pimpinan dan seluruh unit kerja dalam menindaklanjuti hasil pengawasan sebagai bagian dari budaya perbaikan berkelanjutan.

Untuk memastikan seluruh rekomendasi hasil pengawasan dapat dimanfaatkan secara optimal, Stasiun KIPM Tahuna telah melakukan beberapa langkah dan alternatif solusi, antara lain:

1. Penyusunan rencana tindak lanjut (RTL) atas setiap rekomendasi hasil pengawasan, lengkap dengan penanggung jawab dan batas waktu penyelesaian.

2. Pemantauan dan evaluasi tindak lanjut secara berkala, sehingga setiap progres dapat dikendalikan dan diselesaikan tepat waktu.
3. Koordinasi intensif antara pimpinan, unit kerja terkait, dan APIP, guna memastikan kesesuaian tindak lanjut dengan rekomendasi yang diberikan
4. Pendokumentasian bukti tindak lanjut secara tertib dan sistematis, sebagai dasar penetapan status tindak lanjut menjadi TUNTAS.
5. Integrasi hasil pengawasan ke dalam perbaikan SOP dan proses bisnis, sehingga rekomendasi tidak hanya bersifat administratif tetapi berdampak pada peningkatan kinerja.
Efisiensi penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan tercermin dari:
 1. Optimalisasi sumber daya internal, tanpa memerlukan tambahan tenaga atau biaya khusus.
 2. Pemanfaatan forum koordinasi dan rapat internal rutin, sehingga tidak menambah beban anggaran.
 3. Penggunaan sistem dan dokumen yang telah tersedia, untuk pemantauan dan pelaporan tindak lanjut rekomendasi.
 4. Penyelarasan tindak lanjut dengan kegiatan rutin unit kerja, sehingga perbaikan kinerja dapat dilakukan secara efektif dan efisien.
 Sebagai upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian indikator di masa mendatang, Stasiun KIPM Tahuna melakukan dan merekomendasikan langkah-langkah sebagai berikut:
 1. Mempertahankan komitmen pimpinan dan seluruh pegawai dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan tepat waktu dan tuntas.
 2. Meningkatkan kualitas tindak lanjut agar bersifat preventif, tidak hanya menyelesaikan temuan tetapi mencegah terulangnya permasalahan.
 3. Memperkuat sinergi dengan APIP, khususnya dalam pembinaan dan pendampingan pengawasan.
 4. Mengintegrasikan rekomendasi hasil pengawasan ke dalam perencanaan dan manajemen kinerja, sebagai dasar peningkatan kinerja organisasi.
 5. Melakukan monitoring berkelanjutan atas efektivitas tindak lanjut, untuk memastikan rekomendasi benar-benar berdampak pada perbaikan kinerja.

Kegiatan Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup UPT Stasiun KIPM Tahuna tidak terdapat kendala sehingga dalam prosesnya kegiatan berjalan lancar. Untuk perbandingan target dan realisasi IKU serta renstra 2019-2024 ditampilkan pada tabel 3.23 berikut ini:

Tabel 3. 23 Realisasi IK-11 Tahun 2020-2025 dan Renstra 2020-2025

Indikator Kinerja	Realisasi					2025		Renstra 2020-2025	
	2020	2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup UPT Stasiun KIPM Tahuna(%)	-	-			80	80	100	70	70

4 Indeks Kepuasan Masyarakat lingkup UPT Stasiun KIPM Tahuna

a. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik.

b. Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup BPPMHKP menggunakan elektronik SKM (e-survey SKM), masyarakat/pengguna jasa untuk dapat menyatakan persepsi atas kepuasan layanan dapat mengakses Aplikasi Survey Kepuasan Masyarakat dengan alamat: <https://ptsp.kkp.go.id/skm/login> Aplikasi yang terdapat di web tersebut dapat di akses oleh kepada pengguna jasa di masing masing UPT BPPMHKP.

c. Daftar pertanyaan survey terdiri atas 9 unsur pertanyaan berupa Persyaratan; Sistem; Prosedur; Waktu Pelayanan; Biaya/Tarif; Produk Spesifikasi; Kompetensi Pelaksana; Perilaku Pelaksana; Penanganan Pengaduan; dan Sarana. Nilai indeks diperoleh dari nilai total rata-rata hasil kuisioner dari seluruh UPT BPPMHKP.

Pengukuran:

$$\text{Bobot Nilai rata-rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{9} = 0.1111$$

Untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan, digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{IKM} = \frac{\text{Total dari nilai persepsi per unsur} \times \text{Nilai penimbang}}{\text{Total unsur yang terisi}}$$

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25-100 maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut: $\text{IKM unit pelayanan} \times 25$

Pada Triwulan I tahun 2025 Stasiun KIPM Tahuna Nilai SKM adalah 92,59 atau 105,22% dari Target 88 sehingga sudah tercapai.

Pada Triwulan II tahun 2025 Stasiun KIPM Tahuna Nilai SKM adalah 94 atau 106,82% dari Target 88 sehingga tercapai.

Pada Triwulan III tahun 2025 Stasiun KIPM Tahuna Nilai SKM adalah 94 atau 97,22% dari Target 88 sehingga tercapai

Total Nilai: $97,22+97,22+97,22+97,22+97,22+97,22+97,22+97,22+97,22$

Rata-rata: $874,98/9 = 97,22$, nilai SKM, 3,89 nilai indeks

IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat), rata-rata dikonversi ke skala 100 dengan cara mengalikan rata-rata skor dengan nilai dasar 25.

Perhitungan: $874,98 \times 25 = 97,22$

Sehingga ada Triwulan IV tahun 2025 Stasiun KIPM Tahuna Nilai SKM adalah 3,89 atau 115,77% dari Target 3,36 sehingga tercapai.

Untuk target dan capaian realisasi tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 3.28 berikut:

Tabel 3. 28 Capaian Sasaran Kegiatan Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan IK 14

Indikator Kinerja	Target	Capaian	% Terhadap Target 2025
Indeks Kepuasan Masyarakat lingkup UPT Stasiun KIPM Tahuna (Indeks)	3,36	3,89	115,77

Pada Tahun 2025, Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) lingkup UPT Stasiun KIPM Tahuna menunjukkan tren peningkatan kinerja yang signifikan pada setiap triwulan.

Pada Triwulan I Tahun 2025, Nilai SKM sebesar 92,59 atau 106,82% dari target 88, sehingga mencapai target yang ditetapkan. Selanjutnya, pada Triwulan II Tahun 2025, Nilai SKM meningkat menjadi 94 atau 106,82 % dari target 88, sehingga indikator kinerja dinyatakan tercapai. Peningkatan kinerja ini berlanjut pada Triwulan III Tahun 2025 dengan Nilai SKM sebesar 94 atau 97,22% dari target 88, yang menunjukkan semakin meningkatnya tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan. Pada Triwulan IV Tahun 2025, dengan nilai SKM adalah 3,89 atau 115,77% berdasarkan hasil pengolahan 9 unsur pelayanan dengan total nilai 3,89 dan nilai rata-rata 3,89, yang dikonversi ke skala 100 menghasilkan Nilai IKM sebesar 97,22. Dengan demikian, Nilai SKM pada Triwulan IV adalah 3,89 atau 115,77% dari target 3,36, sehingga indikator kinerja dinyatakan tercapai dan melampaui target.

Secara keseluruhan target sudah terpenuhi hingga akhir tahun 2025 kinerja pelayanan publik Stasiun KIPM Tahuna menunjukkan perbaikan berkelanjutan dan capaian yang sangat baik.

Sebagai tindak lanjut atas hasil SKM, Stasiun KIPM Tahuna telah melakukan beberapa alternatif solusi, antara lain:

1. Melakukan evaluasi hasil SKM secara internal, untuk mengidentifikasi unsur pelayanan yang masih memerlukan perbaikan.
2. Meningkatkan kecepatan dan ketepatan layanan, khususnya pada layanan sertifikasi dan administrasi.
3. Memperbaiki penyampaian informasi layanan, baik melalui media informasi di kantor layanan maupun media digital.
4. Meningkatkan sikap dan perilaku pelayanan petugas, melalui penguatan budaya pelayanan prima.
5. Menindaklanjuti masukan dan saran masyarakat secara langsung, sebagai bahan perbaikan layanan.

Efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian indikator ini ditunjukkan melalui:

1. Pemanfaatan sarana dan prasarana pelayanan yang telah tersedia, tanpa memerlukan investasi tambahan yang signifikan.
2. Pelaksanaan SKM secara mandiri, dengan memaksimalkan peran petugas layanan dan tim pengelola SKM internal.
3. Penggunaan media digital dalam pengumpulan data SKM, sehingga mengurangi biaya administrasi dan mempercepat proses pengolahan data.
4. Integrasi hasil SKM dengan evaluasi kinerja layanan, sehingga hasil survei dapat langsung dimanfaatkan untuk perbaikan tanpa proses tambahan.

Untuk menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di masa mendatang, Stasiun KIPM Tahuna melakukan serta merekomendasikan beberapa upaya perbaikan kinerja sebagai berikut:

1. Melaksanakan SKM secara konsisten dan berkelanjutan pada setiap triwulan, sebagai dasar evaluasi layanan.
2. Menindaklanjuti hasil SKM secara lebih sistematis, dengan menyusun rencana aksi per unsur pelayanan.
3. Meningkatkan kompetensi petugas layanan, terutama dalam aspek komunikasi dan pelayanan prima.
4. Memperkuat pemanfaatan teknologi informasi, guna meningkatkan aksesibilitas dan transparansi layanan.
5. Menjadikan hasil SKM sebagai salah satu indikator utama perbaikan kinerja organisasi, khususnya dalam peningkatan kualitas pelayanan publik.

Kegiatan Indeks Kepuasan Masyarakat lingkup UPT Stasiun KIPM Tahuna tidak terdapat kendala sehingga dalam prosesnya kegiatan berjalan lancar. Untuk perbandingan target dan realisasi IKU serta renstra 2019-2024 ditampilkan pada tabel 3.29 berikut ini:

Tabel 3. 29 Realisasi IK-14 Tahun 2020-2025 dan Renstra 2020-2024

Indikator Kinerja	Realisasi					2025		Renstra 2020-2024	
	2020	2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Indeks Kepuasan Masyarakat lingkup UPT Stasiun KIPM Tahuna (Indeks)	-	-	-	-	94	3,36	3,89	70	70

BAB IV

P E N U T U P

1.1 KESIMPULAN

Selama Tahun 2025, Stasiun KIPM Tahuna telah melaksanakan pemantauan secara berkelanjutan terhadap capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), capaian output kegiatan, serta realisasi anggaran sebagai bagian dari penerapan *early warning system* kinerja. Pemantauan ini menjadi dasar evaluasi kinerja tahun berjalan sekaligus bahan penyusunan perencanaan dan penganggaran pada tahun berikutnya.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, secara umum sasaran strategis dan IKU Stasiun KIPM Tahuna Tahun 2025 telah tercapai bahkan sebagian besar melampaui target yang ditetapkan. Hal ini tercermin dari:

1. Capaian IKU teknis dan layanan publik yang menunjukkan tren positif dan berkelanjutan, antara lain Nilai SKM
2. Capaian IKU tata kelola dan akuntabilitas kinerja, seperti Nilai SAKIP, Indeks Profesionalitas ASN, dan Indeks Kepuasan Masyarakat

Namun demikian, dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2025 masih dijumpai beberapa kondisi yang perlu menjadi perhatian, antara lain:

1. Beberapa indikator kinerja menunjukkan capaian di atas 100%, yang mengindikasikan bahwa target kinerja yang ditetapkan pada awal tahun masih relatif rendah dibandingkan dengan potensi capaian dan sumber daya yang tersedia;
2. Pada awal tahun anggaran (Triwulan I) masih terdapat beberapa indikator layanan yang belum mencapai target, namun telah dilakukan langkah perbaikan secara bertahap sehingga capaian kinerja dapat ditingkatkan hingga akhir tahun.

1.2 LANGKAH - LANGKAH UPAYA PERBAIKAN

Meskipun capaian kinerja Tahun 2025 secara umum menunjukkan hasil yang baik, tantangan ke depan yang dihadapi Stasiun KIPM Tahuna semakin kompleks, seiring dengan:

- meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik;
- perkembangan teknologi produksi dan distribusi hasil perikanan;
- tuntutan penerapan standar mutu dan keamanan pangan yang semakin ketat;
- serta kebutuhan peningkatan daya saing produk perikanan Indonesia. Kondisi tersebut

berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap peningkatan beban kerja, kompleksitas tugas, kebutuhan SDM aparatur yang profesional, serta kesiapan sarana dan prasarana pendukung pengawasan, pemeriksaan, dan pengujian.

Sebagai upaya perbaikan dan peningkatan kinerja berkelanjutan, Stasiun KIPM Tahuna menetapkan langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas perencanaan kinerja dan penetapan target IKU Target kinerja akan ditetapkan secara lebih realistis dan menantang dengan berbasis pada capaian historis, potensi beban kerja, serta proyeksi kebutuhan pelayanan. Perencanaan kinerja akan diintegrasikan secara lebih kuat

dengan penganggaran berbasis kinerja.

2. Penguatan monitoring dan evaluasi kinerja secara periodik Monitoring dan evaluasi kinerja akan terus dilaksanakan secara bulanan dan triwulanan sebagai *early warning system*, sehingga setiap deviasi capaian

dapat segera diidentifikasi dan ditindaklanjuti melalui rencana aksi yang terukur.

3. Optimalisasi efisiensi penggunaan sumber daya Efisiensi anggaran dan sumber daya akan terus dijaga melalui optimalisasi SDM internal, pemanfaatan teknologi informasi, serta integrasi kegiatan lintas fungsi tanpa mengurangi kualitas output dan layanan.
4. Peningkatan kualitas layanan publik dan kepuasan masyarakat Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) akan terus dimanfaatkan sebagai dasar perbaikan layanan, dengan fokus pada kecepatan, kejelasan informasi, kemudahan prosedur, dan sikap pelayanan petugas.
5. Penguatan tata kelola, akuntabilitas, dan integritas organisasi Upaya peningkatan Nilai SAKIP, akan terus dilakukan secara konsisten sebagai bagian dari reformasi birokrasi berkelanjutan.
6. Peningkatan kapasitas SDM dan sarana prasarana pendukung Peningkatan kompetensi aparatur, profesionalitas ASN, serta kesiapan sarana prasarana

Dengan langkah-langkah tersebut, Stasiun KIPM Tahuna diharapkan mampu mempertahankan capaian kinerja yang telah diraih pada Tahun 2025 serta meningkatkan kualitas kinerja dan pelayanan pada tahun-tahun berikutnya, dalam rangka mendukung ketahanan pangan, perlindungan sumber daya hayati perikanan, serta peningkatan daya saing produk perikanan nasional.

LAMPIRAN
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL
PERIKANAN TAHUNA

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
SK.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu Hasil Kelautan Perikanan	1	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Stasiun KIPM Tahuna (%)	70
		2.	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Stasiun KIPM Tahuna (%)	70
SK.2	Tata Kelola Pemerintahan yang baik diLingkungan BPPMHKP	3.	Survey Kepuasan Masyarakat lingkup Stasiun KIPM Tahuna (Nilai)	88
		4.	Indeks Profesionalitas ASN lingkup Stasiun KIPM Tahuna (Indeks)	87
		5.	Penyelesaian temuan BPK lingkup Stasiun KIPM Tahuna (%)	100
		6.	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Stasiun KIPM Tahuna (%)	80

Data Anggaran

NO	KEGIATAN/SASARAN KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	2.541.108.700
2	Manajemen Mutu	-
3	Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	8.880.000
Total Anggaran Stasiun KIPM Tahuna Tahun 2025		2.549.988.700

PERJANJIAN KINERJA REVISI TAHUN 2025
STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL
PERIKANAN TAHUNA

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
SK.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu Hasil Kelautan Perikanan	1.	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun KIPM Tahuna (%)	70
		2.	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun KIPM Tahuna (%)	70
SK.2	Tata Kelola Pemerintahan yang baik diLingkungan BPPMHKP	3.	Penyelesaian temuan BPK lingkup UPT Stasiun KIPM Tahuna (%)	100
		4.	Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Stasiun KIPM Tahuna (Indeks)	82
		5.	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup UPT Stasiun KIPM Tahuna (Nilai)	86
		6.	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup UPT Stasiun KIPM Tahuna (%)	80
		7.	Indeks Kepuasan Masyarakat lingkup UPT Stasiun KIPM Tahuna (Indeks)	3,36

Data Anggaran

NO	KEGIATAN/SASARAN KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	706.699.000
2.	Manajemen Mutu	0
3.	Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	0
Total Anggaran Stasiun KIPM Tahuna Tahun 2025		706.699.000